

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu unsur belanja langsung. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya rutin, biaya operasional dan pemeliharannya. Belanja modal terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, salah satu dari 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tersebut adalah Infrastruktur. Infrastruktur diprioritaskan dalam penganggaran belanja modal, setelah dikurangi belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dan belanja wajib lainnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

Belanja modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 53, adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam

bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penelitian mengenai belanja modal ini menarik untuk dilakukan karena belanja modal diprioritaskan dalam pembangunan nasional tahun 2010 sampai dengan 2014. Faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi belanja modal juga menjadi hal yang menarik dibahas mengingat belanja modal merupakan belanja pembangunan infrastruktur yang memicu langsung peningkatan perekonomian penduduknya. Rencana pembangunan nasional ini didukung dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dengan daerah tentunya perlu sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan dengan menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sinkronisasi ini tertuang dalam rancangan APBD.

Faktor-faktor yang dianggap berhubungan dan mempengaruhi belanja modal cukup banyak antara lain pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja keuangan, *flypaper effect*, belanja operasional dan pemeliharaan, kemandirian daerah, desentralisasi fiskal, jumlah penduduk, transfer pemerintah pusat dan lain-lain.

Kemandirian dihitung melalui rasio kemandirian daerah dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2011). Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemandirian daerah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menguji tentang adanya keterkaitan atau hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2007).

Kajian empiris tentang pertumbuhan ekonomi oleh Lin dan Liu dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, dalam evaluasi dana desentralisasi dan perekonomian daerah;

“Rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk merupakan Rasio Belanja Modal per kapita menunjukkan seberapa besar belanja yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio Belanja Modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan”.

Hasil penelitian tesis Akbar (2011) membuktikan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dengan *Adjusted R²* sebesar 74,10%. Secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Belanja modal merupakan salah satu unsur dalam belanja daerah. Untuk itu peneliti ingin melihat pengaruhnya terhadap belanja modal.

Faktor-faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk. Alasan yang mendasari pengambilan variabel-variabel ini adalah terkait dengan kemandirian daerah berhubungan erat dengan proporsi PAD maksimal 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya dalam anggaran cukup besar (Abdullah dan Asmara dalam Abdullah dan Halim, 2006). Nanga dalam Harianto dan Adi (2007) mengindikasikan terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah ini memunculkan tuntutan yang semakin kuat untuk mengubah struktur belanja ke belanja modal, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim dalam Adi, 2007). Selain itu rasio belanja modal terhadap jumlah penduduk ini menurut Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Deskripsi dan Analisis APBD 2012, rasio tersebut menunjukkan kecenderungan pola belanja daerah, apakah suatu daerah cenderung

mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal.

Kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan (Sukanto Reksohadiprojo, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2007).

Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan PDRB pada suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah mereka yang sudah menetap di suatu wilayah paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yonia Ivana (2009). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yang peneliti gunakan memasukkan variabel non keuangan yaitu Jumlah Penduduk dan variabel keuangan yaitu kemandirian daerah. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu DAU, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi. Waktu yang diambil memiliki rentan waktu lebih lama yaitu lima tahun dari tahun 2007-2011 yang sebelumnya tiga tahun. Objek penelitian sebelumnya menjadikan Provinsi Lampung baik kabupaten dan kota, penelitian ini

memilih wilayah penelitian lebih luas dibanding penelitian sebelumnya, yaitu Pulau Sumatera baik kabupaten maupun kota.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengetahui bagaimana **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah.”**

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. seberapa besar pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
- b. seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?
- c. seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal pemerintah daerah?

1.2.2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, penelitian terbatas pada variabel Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Belanja Modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dengan periode pengamatan dari tahun 2007-2011.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris pengaruh kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk pada belanja modal.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. kontribusi empiris, membuktikan dugaan adanya pengaruh kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal,
2. kontribusi kebijakan, memberikan masukan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera dalam penyusunan kebijakan dimasa mendatang mengenai belanja modal,
3. kontribusi teori, sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.